

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ardita Tri Handayani, Tri Suryati, Hera Ayuk Marsela, Dani Luqmana, & Saiful Anwar*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga, Indonesia

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Jumlah Penduduk (JP) terhadap Belanja Daerah (BD). Populasi dari penelitian ini terdiri dari sepuluh kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan untuk penentuan sampel menggunakan metode full sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model regresi data panel. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh beberapa kesimpulan bahwa PAD dan DBH secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap BD pada sepuluh kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2015-2019. Sedangkan, JP secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap BD di sepuluh kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian, secara simultan PAD, DBH dan JP berpengaruh signifikan terhadap BD. Dari hasil Penelitian ini memberikan masukan kepada pemerintah khususnya provinsi Nusa Tenggara Barat untuk lebih memanfaatkan sumber daya yang ada agar dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk dan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat.

Kata kunci: pendapatan asli daerah (PAD); dana bagi hasil (DBH); jumlah penduduk (JP); belanja daerah (BD)

Abstract This study aims to analyze the effect of Regional Original Income (PAD), Revenue Sharing Funds (DBH), Total Population (JP) on Regional Expenditures (BD). The population of this study consisted of ten districts in the province of West Nusa Tenggara. As for the determination of the sample using the full sampling method. The data analysis technique used is panel data regression model analysis. Based on the research that has been carried out, it can be concluded that PAD and DBH partially have no significant effect on BD in ten regencies/cities in the province of West Nusa Tenggara in 2015-2019. Meanwhile, the JP partially has a positive and significant effect on BD in ten regencies/cities in the province of West Nusa Tenggara. Then, simultaneously PAD, DBH and JP have a significant effect on BD. This research provides input to the government, especially the province of West Nusa Tenggara to better utilize existing resources in order to improve the welfare of the population and empower the community so as to increase regional income and reduce dependence on the central government.

Keywords: Regional Original Income (PAD); Revenue Sharing Funds (DBH); Total Population (JP); Regional Expenditures (BD)

JEL Classification: H2; H3; H5; H6; H7; H8; O1; O2; O4

* Penulis koresponden

E-mail: saifulanwarmieta@iainsalatiga.ac.id

PENDAHULUAN

Suatu daerah telah diberikan kewenangan yang besar untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kewenangan tersebut bertujuan agar pemerintah daerah dan masyarakat lebih memperlakukan dalam pelayanan dan mempermudah masyarakat dalam mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Disisi lain, Anggaran belanja daerah sebenarnya memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan publik atas sarana dan prasarana umum yang diberikan oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan anggaran belanja daerah hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti halnya pembangunan infrastruktur. Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera lahir batin sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil makmur (Mahi & Trigunarso, 2017)

Tolak ukur kemampuan dan kemandirian otonomi suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah penerimaan APBD yang semakin meningkat. Sedikitnya perolehan PAD dapat menjadikan suatu hambatan dan harus segera diperhatikan secara sungguh-sungguh setiap masing-masing pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat. Sehingga diharapkan Pemerintah Daerah dapat menggali berbagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan daerah (Herawati, 2019). Pada UU Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembangunan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat untuk daerah.

Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan kinerja keuangan pemerintah, salah satunya dengan menggunakan adanya peningkatan kemandirian daerah, yang memberikan indikasi berkurangnya ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah, baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah maupun PAD lain yang sah perlu untuk terus diupayakan guna mendukung pembiayaan daerah.

Karakteristik pemerintah daerah memiliki indikator-indikator lainnya yaitu pengawasan dari auditor internal, umur administrative daerah tersebut, retribusi daerah, dan pertumbuhan ekonomi. selain itu, masih terdapat determinan lain kinerja keuangan, yaitu tata kelola pemerintah, baik transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, dan partisipasi masyarakat, jumlah penduduk dan jumlah pekerja daerah tersebut.

Kainde (2013) menyatakan bahwa belanja daerah merupakan seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang menjadi pengurangan nilai pendapatan bersih (ekuitas dana) dalam suatu periode tahun anggaran. Penyusunan belanja daerah harus didasarkan pada perhitungan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara efektif yaitu adil dan merata, agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati terutama dalam hal pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penyusunan APBD Tahun

2011. Sebaiknya alokasi belanja daerah mengutamakan kepentingan publik khususnya masyarakat daerah setempat agar tercapai tujuan pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat daerah yang makmur dan sejahtera.

Dari penelitian terdahulu menunjukan bahwa variable independen PAD berpengaruh positif signifikan terhadap variable dependen belanja modal daerah pada kabupaten/kota di provinsi NTB (Herawati, 2019). Sedangkan Berdasarkan hasil estimasi data panel *Cross Section* dan *Time Series* menunjukan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif signifikan pada tingkat α sampai dengan 10% terhadap belanja modal, hal tersebut dikarenakan dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk kebutuhan daerah tersebut dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sehingga dana perimbangan akan sangat mempengaruhi peningkatan belanja modal di suatu daerah (Nagari, 2017). Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (2015-2019)

Belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah. Menurut Kementrian Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU 33 Tahun 2004). Belanja daerah mencakup semua pengeluaran yang berasal dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu periode anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah (PP No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan). Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai kemanfaatan lebih dari satu periode. Belanja modal ini dapat berupa pengadaan asset daerah (misalnya pembangunan infrastruktur di daerah) yang digunakan untuk peningkatan pelayanan publik. Konsekuensi dari belanja ini adalah munculnya belanja rutin, misalnya untuk kepentingan pemeliharaan (Andirfa et al., 2016). Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 167 ayat 1 menyatakan secara tegas bahwa belanja daerah harus dimanfaatkan untuk memberikan perlindungan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Tujuan ini bisa terwujud apabila pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan publiknya, baik di bidang pendidikan, kesehatan, penyediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan pengembangan sistem jaminan sosial (Marfiana & Kurniasih, 2013).

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang dihasilkan dalam wilayah yurisdiksinya yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran, dan harus didorong pertumbuhannya agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan (Fatimah et al., 2020). Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan. pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Berdasarkan berlakunya desentralisasi maka Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk

memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan yang penting untuk pemerintah dalam memenuhi belanja dan menentukan kemampuan daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diperoleh maka semakin mandiri daerah tersebut, sehingga tidak harus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Kelompok PAD dibagi menjadi menjadi empat jenis pendapatan yaitu: Retribusi Daerah, Pajak Daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan PAD lain-lain yang sah. Pada penelitian yang dilakukan Sorongan (2011) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini menandakan kenaikan pendapatan asli daerah tidak diikuti oleh kenaikan belanja daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Reni (2004); Herawati (2019) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini diperkuat oleh penelitian Tuasikal (2008); Afrizawati (2011); Mentayani et al., (2012); Januarti et al. (2022); Safa'ah et al. (2021) yang menyatakan bahwa bila pendapatan asli daerah meningkat maka berpengaruh pada belanja daerah. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diperoleh hipotesis yaitu PAD berpengaruh positif terhadap BD.

Dana bagi hasil merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang didistribusikan kepada daerah berdasarkan presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah untuk pelaksanaan desentralisasi (Putra & Dwirandra, 2015). Hermawan (2007) pada bukunya Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan bantuan yang bersifat blok, yang artinya setiap daerah menentukan sendiri prioritas penggunaan sumber dana dan tidak ada campur tangan dari pemerintah pusat.

Dana bagi hasil diperoleh dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang diperoleh dari pajak sendiri antara lain: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Sedangkan dana bagi hasil yang diperoleh dari sumber daya alam antara lain yang berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

Wandira (2013) dana bagi hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Wahyuni & Adi (2009); Januarti et al. (2022); Safa'ah et al. (2021) menyebutkan bahwa dana bagi hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah selain yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Reni (2004) menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh secara positif signifikan terhadap Belanja Daerah. Pernyataan ini diperkuat oleh riset Nagari (2017) bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Wulandari (2014) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil mempunyai pengaruh signifikan positif

terhadap belanja daerah diterima (Januarti et al., 2022; Safa'ah et al., 2021). Dan hal ini juga sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil dapat mendorong belanja daerah untuk kegiatan-kegiatan prioritas pembangunan nasional. Penelitian lain yang dilakukan oleh Andirfa et al., (2016) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Daerah. Hal ini ditunjukkan bahwa Dana bagi hasil meningkat tidak diimbangi dengan peningkatan belanja daerah. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diperoleh hipotesis yaitu DBH berpengaruh positif terhadap BD.

Dalam Badan Pusat Statistik, Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Jumlah penduduk menjadi variabel yang menunjukkan kebutuhan terhadap penyediaan layanan publik di setiap daerah (Devita et al., 2014). Bagi pemerintah daerah yang memiliki jumlah penduduk yang besar bisa menjadi aset modal pembangunan, jika dapat meningkatkan kualitas SDM sehingga bisa meningkatkan pendapatan daerah. Namun jumlah penduduk suatu daerah yang meningkat cepat juga menjadi permasalahan yang berhubungan dengan ekonomi daerah, karena jumlah penduduk yang besar akan menimbulkan pengeluaran yang besar dari pendapatan daerah. Permasalahan ledakan jumlah penduduk sering terjadi di negara berkembang seperti Indonesia (Pamungkas, 2019)

Pada penelitian yang dilakukan oleh Asmuruf et al., (2015) menyatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah. Liando & Hermanto (2017) didalam penelitiannya membenarkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap belanja daerah, begitu pula pada penelitian yang dilakukan oleh Sanusi & Yusuf (2018) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, selain itu penelitian yang dilakukan oleh Fatimah et al., (2020) juga menghasilkan bahwa Jumlah Penduduk memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Disusul penelitian berikutnya yakni dari Utami (2019) juga menyimpulkan bahwa Jumlah Penduduk mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, pernyataan ini diperkuat oleh Fitriana & Sudarti (2018) bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap belanja daerah (Januarti et al., 2022; Safa'ah et al., 2021). Dari pernyataan tersebut dapat diperoleh hipotesis ketiga yaitu Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan dari pihak lain yang bukan periset sendiri dengan tujuan yang lain (Istijanto, 2009). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berupa Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang berfokus pada data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang berupa jumlah penduduk di provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2015-2019. Selain itu sebagai bahan pendukung digunakan buku referensi, jurnal, surat kabar

elektronik, dan beberapa situs resmi yang terkait dengan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Population atau *Universe* adalah jumlah dari seluruh objek (individu-individu/satuan-satuan) yang dari karakteristiknya hendak diduga (Subagyo & Djarwanto, 2005). Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili dari seluruh data (Sunaryo, 2019). Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *full sampling* yang dimana semua populasi digunakan menjadi sampel. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sepuluh kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 2015-2019 yang terdiri dari, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Subawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kota Mataram. Sehingga keseluruhan data yang digunakan yaitu limapuluh sampel yang terdiri dari 10 Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu 2015-2019.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari suatu variabel independen terhadap variabel dependen maka penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif model regresi data panel. Data panel merupakan data yang terdiri dari kombinasi data *time series* dan data *cross-section* dengan kata lain, data panel terdiri dari data beberapa objek dan meliputi beberapa waktu (Nuryanto & Pambuko, 2018). Dari data tersebut kemudian dikaitkan dan dianalisis pengaruh antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Tingkat signifikansi yang sering digunakan dalam analisis yakni sebesar 5% (0,05) (Solihin & Anggraini, 2020). Apabila nilai probabilitas dalam hasil analisis > 5% maka tidak ada pengaruh yang signifikan. Begitupun sebaliknya, apabila nilai probabilitas dalam hasil analisis <5% maka terdapat pengaruh yang signifikan. Pengujian ini terdiri dari Uji Statistik Deskriptif, Uji Stasioneritas, Uji Linier Berganda, Uji Statistik dan Uji Asumsi Klasik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Statistic Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan bagian dari statistik yang mempelajari bagaimana cara pengumpulan dan penyajian data agar mudah dipahami (Hasan, 2003). Dalam penelitian ini jumlah data yang digunakan sebanyak lima puluh sampel yang terdiri dari sepuluh kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2015-2019.

Tabel 1. Uji Statistic Deskriptif

	BD	PAD	DBH	JP
Mean	1.2212	1.6911	9.8410	487333.5
Median	1.2512	1.4911	6.4910	455734.0
Maximum	2.7612	3.9811	6.4311	1200612.
Minimum	9.0510	3.0510	1.5810	44968.00
Std. Dev.	5.7611	9.2310	1.1711	336816.9
Observations	50	50	50	50

Sumber: Data diolah (2021)

Dari tabel 1. dapat dilihat bahwa variabel pendapatan asli daerah (PAD) memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 168,907,236,75, dengan nilai tertinggi dan nilai terendahnya yaitu sebesar Rp 398,088,460,541 dan Rp 30,524,799,756. Nilai tertinggi pendapatan asli daerah terdapat di Kabupaten Lombok Timur tahun 2017 yang menandakan bahwa pada daerah tersebut memiliki kemandirian ekonomi yang tinggi. Selanjutnya untuk nilai terendah terdapat di Kota Bima pada tahun 2016, hal ini dikarenakan daerah tersebut masih bergantung kepada pemerintah pusat terkait hal pembiayaan belanja daerahnya.

Kemudian untuk variabel dana bagi hasil (DBH) memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 98,365,524,546 dengan nilai tertinggi sebesar Rp 643,067,990,450 oleh Kabupaten Mataram pada tahun 2015, dengan jumlah penduduk yang tinggi, daerah tersebut memiliki kemandirian yang besar dalam membiayai pembangunan otonomi daerahnya.

Sedangkan nilai terendah sebesar Rp 15,801,782,446 dipegang oleh Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2015, daerah ini masih bergantung masih ketergantungan dengan pemerintah pusat.

Selanjutnya untuk variabel jumlah penduduk (JP) memiliki nilai rata-rata sebesar 487,334 dengan nilai terendah yaitu sebesar 44,968 yang terdapat di kabupaten Sumbawa ada tahun 2017 dan nilai tertinggi yaitu sebesar 1,200,612 yang terdapat di kabupaten Lombok Timur pada tahun 2019. Laju pertumbuhan penduduk di pegaruhi oleh tinggi rendahnya jumlah penduduk di daerah tersebut.

Untuk variabel dependen belanja daerah (BD) memiliki nilai rata-rata sebesar Rp 1,221,488,263,492 dengan nilai maksimum dan nilai minimumnya yaitu sebesar Rp 2,757,743,150,454 dan Rp 90,464,795,806. Nilai maksimum belanja daerah berada di kabupaten Lombok Timur pada tahun 2019 yang berarti daerah tersebut lebih berfokus pada pembangunan daerah. Sedangkan untuk nilai minimum belanja daerah berada di kabupaten Lombok Utara pada tahun 2017 yang dikarenakan jumlah penduduk pada daerah tersebut belum begitu tinggi yang diikuti dengan wilayah yang belum luas.

Uji Stasioneritas

Uji Stasioneritas digunakan untuk mengetahui bahwa data *time series* tidak ada pengaruhnya oleh waktu (Ilham & Sinurat, 2021). Di peneilitan ini menggunakan uji

stasioneritas yaitu Uji unit root Levin, Lin&Chu (LLC). Untuk mengetahui stasioneritas atau tidak dapat dilihat dari probabilitas $< \alpha=0,05$.

Tabel 2. Uji Stasioneritas

No	Variabel	Probability	Keterangan
1.	Belanja Daerah (JP)	0,0000	Data Stasioner
2.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,0000	Data Stasioner
3.	Dana Bagi Hasil (DBH)	0,0000	Data Stasioner
4.	Jumlah Penduduk (JP)	0,0000	Data Stasioner

Sumber: Data diolah (2021)

Pada tabel 2 terdapat uji Uji Stasioneritas yang menunjukkan bahwa variabel Belanja Daerah (BD) memiliki nilai *probability* sebesar 0,0000 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai $\alpha=0,05$, yang artinya variabel Belanja Daerah (BD) memiliki data yang stasioner. Selanjutnya variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai *probability* sebesar 0,0000 dimana nilai tersebut lebih besar dari nilai $\alpha=0,05$ yang artinya data tersebut stasioner. Sama halnya dengan variabel Dana Bagi Hasil (DBH) dan variabel Jumlah Penduduk (JP) memiliki nilai *probability* sebesar 0,0000 dan dapat disimpulkan bahwa variabel DBH dan JP memiliki data yang stasioner.

Uji Model

Tabel 3. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.764128	(9,37)	0.0019
Cross-section Chi-square	32.501509	9	0.0002

Sumber: Data diolah (2021)

Uji Chow digunakan untuk mengetahui apakah *Fixed Effect Model (FEM)* atau *Common Effect Model (CEM)* yang akan dipilih untuk mereestimasi data (Setyadi & Dermawan, 2021). Dalam Uji Chow untuk menentukan keputusan diperoleh berdasarkan nilai *cross-section chisquare* $> \alpha=0,05$ maka model *Common Effect Model (CEM)* yang terpilih. Namun jika nilai *cross-section chisquare* $< \alpha=0,05$, maka model *Fixed Effect Model (FEM)* yang akan dipilih. Dapat dilihat dari tabel 3 diatas diperoleh nilai *cross-section chisquare* sebesar $0.0002 < \alpha=0,05$. Maka model *Fixed Effect Model (FEM)* yang terpilih dalam pengujian.

Tabel. 4. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.380595	3	0.4973

Sumber: Data diolah (2021)

Untuk uji selanjutnya yaitu Uji Hausman. Uji hausman merupakan uji untuk menentukan model regresi mana yang lebih tepat dari *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Didalam pengujian ini, nilai probabilitas pada bagian *cross-section random* dibandingkan dengan $> \alpha=0,05$ maka *Random Effect* yang dipilih. Begitupun sebaliknya, jika nilai probabilitas pada bagian *cross-section random* $< \alpha=0,05$ maka

Fixed Effect yang dipilih. Tabel 4 menunjukkan hasil pengujian *hausman* dapat diketahui bahwa nilai *cross-section random* > $\alpha=0,05$, maka model yang dipilih adalah *Random Effect Model*.

Tabel 5. Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects			
Breusch-Pagan	9.111453 (0.0025)	1.506455 (0.2197)	10.61791 (0.0011)

Sumber: Data diolah (2021)

Uji Lagrange Multiplier (LM) merupakan uji dampak dari spasial yang lebih spesifik dalam menguji efek dependensi spasial yaitu untuk menguji apakah ada dependensi dalam autoregresi atau error yang dibagi menjadi dua model yaitu *Random Effect* dan *Common Effect* (Caroline, 2020). Untuk mengetahui penentuan keputusan dalam Uji Lagrange Multiplier (LM) dapat dilihat jika nilai *Breusch Pagan* > $\alpha=0,05$ maka masuk kedalam model *Common Effect* begitupun sebaliknya, apabila *Breusch Pagan* < $\alpha=0,05$ maka masuk kedalam model *Random Effect*. Berdasarkan hasil pengujian menghasilkan tabel 5 diatas diperoleh nilai dari *Breusch Pagan* sebesar $0.0025 < 0.05$ maka model yang digunakan adalah *Random Effect*.

Uji Hipotesis

Tabel 9. Uji Hipotesis

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.8111	1.1911	4.039624	0.0002
PAD	0.661332	0.709915	0.931565	0.3564
DBH	0.305809	0.456943	0.669249	0.5067
JP	1227911.	193823.9	6.335190	0.0000
R-squared	0.614006	Mean dependent var		1.2212
Adjusted R-squared	0.588832	S.D. dependent var		5.7611
S.E. of regression	3.7011	Akaike info criterion		56.18545
Sum squared resid	6.2824	Schwarz criterion		56.33841
Log likelihood	-1400.636	Hannan-Quinn criter.		56.24370
F-statistic	24.39091	Durbin-Watson stat		0.974700
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah (2021)

Uji R Square

Uji R Square digunakan untuk mengetahui kemampuan model untuk menrapkan variabel independen dengan variabel dependen. Dari tabel diatas (tabel 9) meneunjukkan bahwa nilai R-Square sebesar 0.614006 yang berarti bahwa pengaruh variabel pendapatan asli daerah (PAD), dana bagi hasil (DBH), dan jumlah penduduk (JP) terhadap belanja daerah sebesar 61,40% yang artinya pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan jumlah penduduk memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja daerah sebesar 61,40%, untuk sisanya sebesar 38,60 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk kedalam model penelitian.

Uji Statistik F

Uji Statistik F digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen (Suyono, 2018). Dari tabel diatas dapat dilihat nilai Prob (F-statistic) sebesar 0.000000 yang artinya lebih kecil dari nilai signifikan $\alpha=0,05$. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

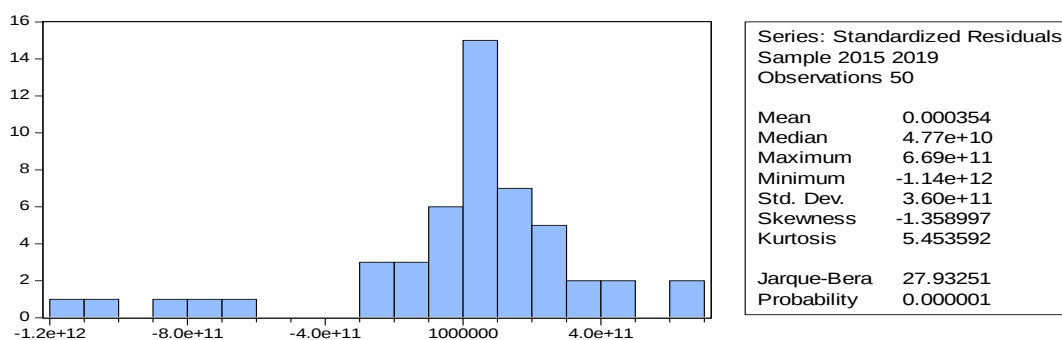
Uji Statistik T

Uji Statistik T digunakan untuk menguji pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan perbedaan variabel terikat pada kedua sampel (Payadnya & Jayantika, 2018). Untuk mengetahuinya dapat dilihat dengan cara membandingkan nilai probabilitas setiap variabel independen dengan nilai $\alpha=0,05$. Dari tabel diatas dapat dilihat variabel pendapatan asli daerah (PAD) memiliki nilai probabilitas sebesar $0.3564 > 0.05$ sehingga dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Selanjutnya untuk variabel dana bagi hasil (DBH) memiliki nilai probabilitas sebesar $0.5067 > 0.05$ yang artinya bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Kemudian untuk variabel jumlah penduduk (JP) memiliki nilai probabilitas sebesar $0.000 < 0,05$. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi antara variabel bebas dan variabel terikat apakah keduanya memiliki distribusi yang normal atau tidak normal (Ramadhyanti, 2019). Hal ini dapat dilakukan dengan melihat nilai Jarque-Bera pada grafik histogram. Berdasarkan grafik histogram pada gambar diatas dapat diketahui nilai Jarque-Bera sebesar 27.93251 yang lebih besar dari nilai signifikan $\alpha=0,05$. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa telah lulus uji normalitas dan data terdistribusi dengan normal.



Gambar 1. Uji Normalitas

Sumber: Data diolah (2021)

Uji Multikolinearitas

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

	PAD	DBH	JP
Pendapatan Asli Daerah	1.000000	0.101998	0.576586
Dana Bagi Hasil	0.101998	1.000000	-0.057590
Jumlah Penduduk	0.576586	-0.057590	1.000000

Sumber: Data diolah (2021)

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda (Duli, 2019). Jika terdapat korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen akan terganggu. Untuk mengetahui agar tidak terganggunya uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai korelasi. Jika nilai korelasi >0.8 antara variabel independen, maka terjadi multikolinearitas. Pada tabel 6, nilai korelasi dari PAD dengan DBH sebesar 0.101998. Kemudian korelasi dari PAD dengan JP sebesar 0.576586 dan korelasi dari DBH dengan JP sebesar -0.057590. sehingga dapat diambil kesimpulan dari masing-masing korelasi menunjukkan angka dibawah 0,8 yang artinya bahwa telah lulus uji multikolinearitas dan tidak ada gejala multikolinear.

Uji Heterokedasitas

Tabel 7. Uji Heterokedasitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.3911	8.80E+10	1.582728	0.1203
Pendapatan Asli Daerah	0.725244	0.524346	1.383140	0.1733
Dana Bagi Hasil	-0.053583	0.337499	-0.158766	0.8745
Jumlah Penduduk	-43835.84	143159.0	-0.306204	0.7608
R-squared	0.047680	Mean dependent var		2.3511
Adjusted R-squared	-0.014428	S.D. dependent var		2.7111
S.E. of regression	2.73E+11	Akaike info criterion		55.57946
Sum squared resid	3.43E+24	Schwarz criterion		55.73242
Log likelihood	-1385.486	Hannan-Quinn criter.		55.63771
F-statistic	0.767690	Durbin-Watson stat		1.175772
Prob(F-statistic)	0.518026			

Sumber: Data diolah (2021)

Uji Heterokedasitas digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan residual dan varians pengamatan satu dengan pengamatan yang lain (Marzuki et al., 2020). Untuk mengetahui adanya gejala Heterokedasitas dengan melakukan Uji Gletser yang dapat dilihat dari nilai probability, jika lebih tinggi dari $\alpha=0,05$ maka tidak terjadi gejala Heterokedasitas. Dari tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas untuk variabel PAD sebesar 0.1733, untuk DBH sebesar 0.8745, dan untuk probabilitas JP sebesar 0.7608. dari semua variabel-variabel bebas menunjukkan bahwa probabilitas lebih tinggi dari $\alpha=0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi bersifat homogen dan tidak terjadi gejala Heterokedasitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 8. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:			
F-statistic	7.224801	Prob. F(2,44)	0.0019
Obs*R-squared	12.36074	Prob. Chi-Square(2)	0.0021

Sumber: Data diolah (2021)

Uji autokorelasi digunakan untuk mendeteksi apakah uji tersebut ada atau tidaknya autokorelasi pada model regresi (Firdaus, 2020). Pada uji autokorelasi penelitian ini menggunakan metode Breusch-Godfrey atau LM (*Lagrange Multiplier*) Test. Jika Prob. F(2,44) > 0.05, maka tidak terjadi gejala autokorelasi. Begitupun sebaliknya, apabila Prob. F(2,44) < 0.05 maka terjadi gejala autokorelasi. Pada tabel 8 diperoleh hasil dari Prob. F(2,44) sebesar $0.0019 < 0.05$ sehingga terjadi gejala autokorelasi.

Pembahasan

Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah

Dari hasil penelitian yang dilakukan, menghasilkan kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2015-2019. Hal tersebut menandakan kenaikan pendapatan asli daerah tidak diikuti oleh kenaikan belanja daerah pada kurun waktu tersebut. Pendapatan asli daerah tidak signifikan dikarenakan belum idealnya pendapatan di provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada penelitian ini, pendapatan asli daerah tertinggi dipegang oleh kabupaten Lombok Timur pada tahun 2017 yakni Rp 398,088,460,541. Sedangkan terendah dipegang oleh kota Bima pada tahun 2016 yakni Rp 30,524,799,756 yang didominasi dari pendapatan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber pendapatan asli daerah yang berasal retribusi daerah diperoleh dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi pelayanan parkir, retribusi pelayanan pasar dan lainnya yang termasuk dalam retribusi daerah. Hal tersebut menandakan bahwa kurang optimalnya daerah tersebut dalam mengelola sumber daya yang belum maksimal. Selanjutnya sumber pendapatan asli daerah yakni pajak daerah yang diperoleh dari pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak restoran, pajak hotel dan lainnya yang termasuk dalam pajak daerah. Kemudian untuk pendapatan asli daerah lain-lain yang sah terdiri dari pendapatan bunga, jasa giro dan hasil dari penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran dalam membayar pajak di provinsi Nusa Tenggara Barat sudah terlaksana dengan baik sehingga dapat memberikan kontribusi pada daerah tersebut. Namun dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah belum optimal dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah, sehingga diharapkan Pemerintah Daerah setempat dapat lebih mengembangkan dan meningkatkan potensi daerah serta sumber daya manusia agar pendapatan asli daerah mengalami peningkatan yang bertujuan untuk menunjang alokasi anggaran belanja daerah. Selain itu

pendapatan asli daerah dapat memberi pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Sorongan (2011) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini menandakan kenaikan pendapatan asli daerah tidak diikuti oleh kenaikan belanja daerah pada kurun waktu 2015-2019. Sedangkan berdasarkan hipotesis yang sudah ditentukan hasil penelitian ini tidak selaras dengan beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Reni (2004); Herawati (2019); Tuasikal (2008); Afrizawati (2011); dan Mentayani et al., (2012) Januarti et al., (2022); Safa'ah et al., (2021) yang menunjukkan bahwa PAD (Pendapatan Asli Daerah) berpengaruh positif signifikan terhadap BD (Belanja Daerah). Hal ini menyatakan bahwa bila pendapatan asli daerah meningkat maka berpengaruh pada belanja daerah.

Dana Bagi Hasil dan Belanja Daerah

Berdasarkan hasil riset yang telah dijelaskan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2015-2019. Dana bagi hasil meningkat tidak diimbangi dengan peningkatan belanja daerah. Dana bagi hasil merupakan dana yang ber sumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tersebut yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak (Harahap, 2011). Tidak adanya korelasi dari dana bagi hasil terhadap belanja daerah karena didalam dana transfer yang menjadi kunci kebutuhan daerah yang sudah dianggarkan dalam rancangan anggaran pendapatan belanja daerah belum ada keoptimalan. Selanjutnya, untuk pendistribusian dana bagi hasil berasal dari pemerintah pusat yang disalurkan ke pemerintah daerah yang telah diatur berdasarkan Pemendagri (Ernayani, 2017). Pada penelitian ini, dana bagi hasil tertinggi terdapat di kabupaten Mataram pada tahun 2015 yakni sebesar Rp 643,067,990,450. Sedangkan terendah terdapat di kabupaten Lombok Utara pada tahun 2015 yakni sebesar Rp 15,801,782,446. Angka tersebut lebih tinggi dari pendapatan yang artinya pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Barat lebih memfokuskan peningkatan dana bagi hasil dibandingkan dengan pendapatan. Jika daerah tersebut terus memfokuskan peningkatan dana bagi hasil dibandingkan dengan pendapatan, maka pertumbuhan ekonominya akan semakin melambat. Dana bagi hasil yang tidak diimbangi dengan belanja daerah artinya pada provinsi Nusa Tenggara Barat mendapatkan suntikan dana oleh pemerintah pusat tetapi belanja daerahnya tidak naik. Dari hal tersebut menandakan bahwa tingginya dana bagi hasil menandakan bahwa daerah tersebut masih bergantung kepada pemerintah pusat dalam mengurus otonomi daerahnya. Sebaiknya dana bagi hasil menjadikan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat.

Dari penjelasan yang diatas hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al., (2017) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH)

tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Dana bagi hasil meningkat tidak diimbangi dengan peningkatan belanja daerah. Sedangkan berdasarkan hipotesis yang sudah ditentukan hasil penelitian ini tidak selaras dengan beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Reni (2004); Nagari (2017); Wulandari (2014); Januarti et al., (2022); Safa'ah et al., (2021) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

Jumlah Penduduk dan Belanja Daerah

Selanjutnya variabel yang terakhir yaitu jumlah penduduk, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi jumlah penduduk di provinsi Nusa Tenggara Barat diikuti dengan meningkatnya belanja daerah guna mencapai kesejahteraan penduduk daerah tersebut. Pada penelitian ini, jumlah penduduk tertinggi pada kurun waktu 2015-2019 terdapat di kabupaten Lombok Timur pada tahun 2019 yakni sebesar 1,200,612. Peningkatan jumlah penduduk maka akan terjadi peningkatan pada belanja daerah. Begitupun sebaliknya, apabila jumlah penduduk mengalami penurunan maka belanja daerah juga akan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk menjadi dasar dalam perencanaan pengalokasian anggaran belanja daerah agar maju dan berkembang. Pengaruh jumlah penduduk yang tinggi terhadap pengalokasian belanja daerah guna untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas-fasilitas publik seperti fasilitas pendidikan, fasilitas umum, fasilitas kesehatan dan lainnya.

Hasil penelitian ini selaras dengan beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Asmuruf et al., (2015); Liando & Hermanto (2017); Sanusi & Yusuf (2018); Mooy & Rahayu (2020); Utami (2019) dan Kiha et al., (2021) Januarti et al., (2022); Safa'ah et al., (2021) bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Namun berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Devita et al., (2014) bahwa jumlah penduduk tidak mempengaruhi belanja daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh beberapa kesimpulan. Pertama, pendapatan asli daerah (PAD) dan dana bagi hasil (DBH) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (BD) pada sepuluh kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2015-2019. Kedua, jumlah penduduk (JP) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah (BD) di sepuluh kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketiga, secara simultan pendapatan asli daerah (PAD), dana bagi hasil (DBH) dan jumlah penduduk (JP) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (BD).

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Barat untuk lebih memanfaatkan kekayaan sumber daya

yang ada agar dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk dan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat.

Adanya keterbatasannya dalam penelitian ini yakni jumlah sampel yang digunakan, diharapkan bisa memberikan motivasi kepada peneliti lainnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan sampel kabupaten/kota yang lebih banyak dan menambah variabel-variabel lain seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana perimbangan dan variabel lainnya untuk memperoleh hasil yang akurat dan menggunakan sampel yang lebih banyak dengan variabel yang berbeda dan dapat memberikan hasil yang berbeda.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran, sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan artikel ini. Dengan kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Bapak Saiful Anwar, M. Acc. selaku dosen yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dari awal penelitian sampai penelitian ini selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Afrizawati. (2011). Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan. *The New Palgrave Dictionary of Economics*, 1.
- 2) Andirfa, M., Basri, D. H., & Majid A, D. Ms. (2016). *Pengaruh Belanja Modal , Dana Perimbangan*. 30–38.
- 3) Anwar, S. (2021). Pengembangan Media Literasi Keuangan Syariah bagi I-Generation (Internet Generation) sebagai Upaya Membangun Sharia Economic Society. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 4(1), 681–695. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.260>
- 4) Asmuruf, F., Rumat, V. A., & Kawung, G. M. V. (2015). *Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Sorong*. 15(05), 727–737.
- 5) Caroline. (2020). *Aplikasi Ekonometrika Spasial Dengan Software Stata : Kajian Spillover Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah*. Scorpindo Media Pustaka.
- 6) Devita, A., Delis, A., & Junaidi. (2014). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi*. 2, 63–70.
- 7) Dewi, K. R., Kepramareni, P., & Novitasari, N. L. G. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak) Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Se-Bali (Periode Tahun 2012-2015). *Jurnal Riset Akuntansi JUARA*, 7(1), 180–188.
- 8) Duli, N. (2019). *Metedologi Penelitian Kuantitatif : Beberapa konsep dasar untuk penulisan skripsi & analisis data dengan SPSS*. Penerbit DEEPUBLISH.
- 9) Ernayani, R. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013) Undang-Undang Asli Daerah (PAD) Provinsi Kaliman*. 1(1).

- 10) Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Equity*, 22(2), 197. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>
- 11) Firdaus, M. (2020). *Aplikasi Ekonometrika Dengan Eviews, Stata dan R*. PT Penerbit IPB Press.
- 12) Fitriana, N., & Sudarti. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *Ilmu Ekonomi*, 2(32), 332–345.
- 13) Harahap, R. U. (2011). *Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap indeks pembangunan manusia pada kab./kota propinsi sumatera utara*. 11(1), 47–58.
- 14) Hasan, M. I. (2003). *Pokok-Pokok Materi Statistik 1*.
- 15) Herawati, E. (2019). Program studi ekonomi pembangunan fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah palopo 2019. *Skripsi, Dd*.
- 16) Hermawan, D. (2007). *Analisis pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pemerataan kemampuan keuangan dan kinerja pembangunan daera ...*
- 17) Ilham, R. N., & Sinurat, M. (2021). *No Title* (H. Efriyadi (ed.)).
- 18) Istijanto. (2009). *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran (cara praktis meneliti konsumen dan pesaing)*.
- 19) Januarti, R., Wulandari, S., Prasasti, S., Yanto, F., & Anwar, S. (2022). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Cafeteria*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.51742/akuntansi.v3i1.490>
- 20) Kainde, C. (2013). Analisis Varians Dan Pertumbuhan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 393–400. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.1838>
- 21) Kiha, E. K., Oki, K. K., & Seran, A. (2021). *Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan jumlah penduduk terhadap anggaran belanja modal di provinsi nusa tenggara timur*. 2(08).
- 22) Liando, I. I., & Hermanto, S. B. (2017). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Pada Kabupaten / Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(22), 1–22.
- 23) Mahi, A. K., & Trigunarso, S. I. (2017). *Perencanaan Pembangunan Dearah Teori dan Aplikasi (Pertama)*. Kencana.
- 24) Marfiana, N., & Kurniasih, L. (n.d.). *Pemeriksaan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota*.
- 25) Marzuki, A., Armereo, C., & Rahayu, P. F. (2020). *Praktikum Statistik* (N. Pangesti (ed.)). Ahlimedia Press.
- 26) Mentayani, I., Hayati, N., & Rusmanto. (2012). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kota Dan Kabupaten Di Propinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Spread*, 2(1), 55–64.
- 27) Mooy, P. C. A., & Rahayu, Y. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *Equity*, 22(2), 197. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>
- 28) Nagari, D. I. (n.d.). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Dearah dan Dana Perimbangan trhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010-2013. *Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

- 29) Nuryanto, & Pambuko, zulfikar bagus. (2018). *Eviews untuk Analisis Ekonometrika Dasar: Aplikasi dan Interpretasi* (1st ed.). UNIMMA Press.
- 30) Pamungkas, N. T. (2019). No Title. In *Pertumbuhan Penduduk, Cempaka Putih, Klaten*.
- 31) Payadnya, I. P. A. A., & Jayantika, I. G. A. N. T. (2018). *Panduan Penelitian Eksperimen beserta analisis statistik dengan SPSS* (1st ed.). Penerbit DEEPUBLISH.
- 32) Putra, I. B. D., & Dwirandra, A. A. A. B. (2015). Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13.
- 33) Ramadhayanti, A. (2019). No Title.
- 34) Reni Apriani. (n.d.). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Langsung di Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2010-2014. *Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- 35) Safa'ah, L. N., Rahmawati, E., Novem, A. A., Azizah, F. K., & Anwar, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Bagi Hasil , dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial (Embiss)*, 1(4), 288–298.
- 36) Sanusi, A., & Yusuf, M. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Pertubuhan Ekonomi terhadap Belanja Daerah Sumatera Utara Tahun 2013-2015 Pendekatan Panel Regression. *Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 50–56.
- 37) Setyadi, D. S., & Dermawan, D. (2021). *Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Alokasi Belanja Kesehatan Terhadap Indikator Kesehatan Pembangunan Manusia (Metode Baru) Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten*.
- 38) Solihin, P. M., & Anggraini, P. G. (2020). *Analisis Data Penelitian- Menggunakan Software STATA*.
- 39) Sorongan, J. F. (2011). *dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, belanja daerah*. 1(3), 171–179.
- 40) Sorongan, J. F., Dau, A. H., Dau, A. H., Dan, P. A. D., Daerah, B., Sorongan, J. F., Ekonomi, F., Akuntansi, J., Sam, U., & Manado, R. (2011). *dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, belanja daerah*. 1(3), 171–179.
- 41) Subagyo, P., & Djarwanto. (2005). *Statistik Produktif*.
- 42) Sunaryo. (2019). *Aplikasi Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi*. UB Press.
- 43) Suyono. (2018). *Analisis Regresi untuk Penelitian* (1st ed.). Penerbit DEEPUBLISH.
- 44) Tuasikal, A. (2008). Pengaruh Dau, Dak, Pad, Dan Pdrb Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 1(2), 124–142.
- 45) Utami, L. D. P. (2019). *Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017*.
- 46) Wahyuni, & Adi, P. H. (2009). *Analisis pertumbuhan dan kontribusi dana bagi hasil terhadap pendapatan daerah*. 32, 1–23.
- 47) Wandira, A. . (2013). *Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum*. 2(33).
- 48) Wulandari, Y. (2014). *Pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di indonesia*.